

BAPENDA

JL. SURAWINATA NO. 36 A PURWAKARTA



RENCANA KERJA

REKA

2022

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



BADAN
PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan ini.

Renja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Bapenda untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 di Bapenda Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2022.

Kami berharap Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Purwakarta serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta, sehingga pembangunan di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Juli 2021





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda	II-10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda	II-14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-14
2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat ..	II-31
BAB III Tujuan dan Sasaran Bapenda	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda	III-4
3.3 Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda	
BAB V Penutup	V-1





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLNRI Nomor 4421);





4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan





Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023;
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.





1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bapenda Kabupaten Purwakarta.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh Bapenda sehingga dapat mewujudkan sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: Tujuan dan Sasaran Bapenda

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda

BAB V : Penutup





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Tahun 2018-2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) telah dilaksanakan.

Terkait dengan Kinerja Urusan Keungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Seluruh Dokumen Perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2020 telah selesai dilaksanakan diantaranya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2021 yang secara keseluruhan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 194 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, pelaksanaan Kinerja Bapenda Kabupaten Purwakarta ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji, TPP dan Insentif) sampai dengan Bulan Desember 2020 dialokasikan sebesar Rp16.332.590.953,00 dan terealisasi sebesar Rp14.970.647.913,00 (91,66%).

B. Belanja Langsung Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 Bapenda Kabupaten Purwakarta menerima alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp10.008.790.000,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 4 Program dan 65 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp8.589.645.676,00 (85,82%), seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini:





Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan
di Bapenda Kabupaten Purwakarta s.d Bulan Desember 2020

No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	2,100,000	70.00	100.00
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	580,800,000	498,749,675	85.87	100.00
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	62,500,000	57,600,000	92.16	100.00
		Penyediaan alat tulis kantor	255,000,000	251,899,100	98.78	100.00
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	605,000,000	489,352,375	80.88	100.00
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
		Penyediaan peralatan rumah tangga	25,000,000	24,520,000	98.08	100.00
		Penyediaan bahan logistik kantor	50,000,000	49,999,977	100.00	100.00
		Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000	29,160,001	58.32	100.00
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110,000,000	51,814,000	47.10	100.00
		Penyediaan Jasa Tenaga PTT	713,200,000	593,100,000	83.16	100.00
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	500,000,000	467,600,000	93.52	100.00
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	200,000,000	176,445,000	88.22	100.00
		Pengadaan peralatan gedung kantor	345,000,000	341,670,000	99.03	100.00
		Pengadaan mebelleur	200,000,000	197,472,000	98.74	100.00
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,000,000	81,174,804	81.17	100.00
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	55,000,000	40,108,503	72.92	100.00
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,000,000	73,260,763	73.26	100.00
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	75,000,000	74,085,000	98.78	100.00
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100,000,000	95,297,981	95.30	100.00
		Sewa Gedung Kantor	25,000,000	21,175,000	84.70	100.00
		Pengadaan Perlengkapan Alat Cetak/Printer	175,000,000	173,940,175	99.39	100.00
		Pengadaan Peralatan Infrastruktur Local Area Network (LAN)	200,000,000	197,195,000	98.60	100.00
		Pengadaan Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras Server Database dan Server Storage	50,000,000	48,097,500	96.20	100.00
		Pengadaan pakalan khusus hari-hari tertentu	152,500,000	149,831,000	98.25	100.00
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	10,000,000	7,740,000	77.40	100.00
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	35,000,000	31,800,000	90.86	100.00





No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
1		Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	15,000,000	3,660,000	24.40	100.00
		Penataan arsip	100,000,000	98,900,000	98.90	100.00
		Penyusunan rencana kerja SKPD	10,000,000	3,900,000	39.00	100.00
		Premi Asuransi Pegawai Non PNS	78,240,000	74,803,669	95.61	100.00
		Penyediaan Jasa Pilot	62,500,000	57,600,000	92.16	100.00
		Pemeliharaan dan Pengembangan Website	50,000,000	49,115,000	98.23	100.00
		Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	4,830,000	48.30	100.00
2	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	Optimalisasi Peningkatan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	175,000,000	166,827,500	95.33	100.00
		Peningkatan pengawasan potensi pajak wajib pajak daerah Non PBB dan BPHTB (Uji Petik)	150,000,000	126,614,000	85.74	100.00
		Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah Non PBB dan BPHTB	100,000,000	89,700,000	89.70	100.00
		Pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	100,000,000	97,400,000	97.40	100.00
		Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	125,000,000	106,940,000	87.15	100.00
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Peta Digital Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	50,000,000	49,280,000	98.56	100.00
		Penyusunan Peraturan Pengelolaan Pajak Daerah	175,000,000	152,388,000	87.08	100.00
		Pemutakhiran data wajib pajak daerah Non PBB dan BPHTB	50,000,000	46,820,000	93.64	100.00
		Pengadaan Sarana Monitoring Penerimaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	100,000,000	98,610,000	98.61	100.00
		Penelitian dan pemeriksaan lapangan pajak daerah Non PBB dan BPHTB	75,000,000	55,090,000	73.45	100.00
		Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi e-SPTPD	45,000,000	44,650,000	99.22	100.00
		Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMPATDA	70,000,000	66,260,000	94.66	100.00
		Pengadaan Aplikasi SIP Air tanah dan POS (Payment on Sales)	75,000,000	-	-	-
		Peningkatan pengelolaan pelayanan pajak daerah Non PBB dan BPHTB	150,000,000	145,000,000	96.67	100.00
3	Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB	Kegiatan Pencetakan Masal SPPT dan DHKP PBB P2	132,000,000	126,360,000	95.73	100.00
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB	215,000,000	165,058,700	76.77	100.00
		Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi PBB	130,000,000	121,080,450	93.14	100.00
		Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan PBB dan BPHTB	210,000,000	194,300,000	92.52	100.00
		Kegiatan Pendataan dan Penilaian Subjek dan Objek Pajak PBB P2	199,000,000	144,135,000	72.43	100.00





No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
4	Program Intensifikasi Penagihan Pendapatan Daerah	Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB	153,800,000	43,260,000	28.13	100.00
		Kegiatan Perekaman Data Objek dan Subjek Pajak PBB P2	200,000,000	156,275,000	78.14	100.00
		Pengembangan Application Program Interface (API) Pajak Daerah	100,000,000	97,430,000	97.43	100.00
4	Program Intensifikasi Penagihan Pendapatan Daerah	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	60,000,000	21,849,000	36.42	100.00
		Kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah	100,000,000	42,150,000	42.15	100.00
		Agresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak	350,000,000	323,481,000	92.42	100.00
		Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	1,219,690,000	1,045,501,848	85.72	100.00
		Peningkatan Kinerja Dana Bantuan Keuangan Provinsi	50,000,000	49,221,400	98.44	100.00
		Pengendalian Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah	6,560,000	6,560,000	100.00	100.00
		Pengendalian dan Pengawasan Penyebaran SKPD	100,000,000	54,594,755	54.59	100.00
		Pengendalian dan Pengawasan Pengurangan, Pembatalan dan Keberatan Pajak Daerah	65,000,000	58,582,500	90.13	100.00
		Pengadaan Aplikasi Retribusi	150,000,000	147,230,000	98.15	100.00

Sumber: LAKIP Bapenda Kab. Purwakarta Tahun 2020

Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat 16 (Enam Belas) kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dibawah 80,00 %, mengingat kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lingkup kegiatan penunjang sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini menunjukan bahwa Bapenda Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2020 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan. Akan tetapi pada tahun anggaran 2020 di Bapenda Kabupaten Purwakarta terdapat juga 1 (Satu) kegiatan yang tidak diserap sama sekali, yaitu pada Kegiatan Pengadaan Aplikasi SIP Air tanah dan POS (Payment on Sales).

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2020, maka perlu dicermati kembali Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 berdasarkan pada outcome setiap program sesuai dengan Formulir Evaluasi Pada Permendagri No. 86 Tahun 2017.



Tabl 2.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
S.D Tahun 2020 Di Bapenda Kabupaten Purwakarta

Urusan Pemerintahan Fungsi Peruntungan: Keuangan

No	Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2021	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun Berjalan
					Target Realisasi Kinerja (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	100.00	100.00					11
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	100.00					
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	100.00	100.00					
4	Program Dukungan Manajemen Administrasi perkantoren	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana/Prasarana Kantor	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	





No	Lurusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Target Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021)	Realisasi Tingkat Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2021	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun Berjalan	
								Realisasi Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang-Undangan		100.00		100.00	100.00	100.00	100.00
		Persentase Ketepatan Data Kinerja OPD			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Program Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B8					B8	B8
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran		100.00				100.00	100.00
6	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	20.00	19.63					
7	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	Persentase Peningkatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB	43.75		36.25	36.25	100.00		
		Persentase Peningkatan Pendapatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB	43.76		36.26	36.26	100.00		



**Rencana Kerja (Ranji) Tahun 2021
Badan Penangutan Daerah (Bapenda)**



No	Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2021	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun Berjalan
					Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Non PBB dan BPHTB	43.77		36.27	36.27	100.00		
		Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Non PBB dan BPHTB	43.78		36.28	36.28	100.00		
6	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah PBB dan BPHTB	Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak PBB	1.19		1.19	1.19	100.00		
		Persentase Peningkatan Data PBB P2 yang Terekam	0.52		0.52	0.52	100.00		
		Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak PBB P2	2.50		2.50	2.50	100.00		
		Persentase Peningkatan Pendapatan dari sektor Pajak BPHTB	2.50		2.50	2.50	100.00		
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB	95.00		90.00	90.00	100.00		
9	Program Intensifikasi Penagihan Pendapatan Daerah	Persentase Pencairan Target PBB P2	120.00		115.00	115.00	100.00		
		Persentase Peningkatan Piutang Terlalu Terhadap Piutang Pendapatan Daerah	30.00		15.00	15.00	100.00		





No	Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Kekuatan Kegiatan sd Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Target Program dan Berjalan	Perkirakan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun Berjalan	
							Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Terhapusnya Piutang Pajak Daerah Kadaluarsa	75,00		35,00	35,00	100,00	
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masalah Keberatan Pajak Daerah/Pendekatan Lainnya	95,00		95,00	95,00	100,00	
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,50		3,50	3,50	100,00	
10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	72,50				67,50	100,00
		Persentase Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7,00				6,00	100,00





Sedangkan untuk tahun berjalan yaitu sampai dengan Parsial I Tahun Anggaran 2021 dengan anggaran mencapai sebesar Rp33.092.083.538,00 terdiri atas 2 Program, 9 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, dengan estimasi capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100,00 % serta tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bapenda Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

- a. Masih Terdapat Usulan Kegiatan yang Setelah Diinventarisasi Belum Sesuai Dengan Rencana Kegiatan yang Telah Dicanangkan Pada Renstra maupun Renja Bapenda.
- b. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Belum Didukung Dengan Ketersediaan Data-Data Yang Memadai dan Sistem Kerja Stakeholder Pendukung Secara Optimal, Sehingga Berpengaruh Terhadap Kualitas Penyusunan Hasil Kajian.
- c. Masih Kurangnya Pemenuhan Akan SDM Aparatur Perencana Bapenda yang Berkualitas Sehingga Berdampak Pada Kualitas Produk Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, maka pada Tahun 2022 Bapenda Kabupaten Purwakarta menyusun Strategi:

- a. Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Managemen Kebutuhan Kantor;
- b. Menyusun Dokumen Perencanaan Peningkatan Pajak Daerah Yang Baik, Berkualitas dan Sistematis; dan
- c. Menyediakan Kebutuhan Kajian Peningkatan Pajak Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pajak Daerah Yang Akurat.

Dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pemenuhan Managemen Kebutuhan Kantor;
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian/Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan Peningkatan Pajak Daerah; dan
- c. Menyusun Kajian-Kajian Peningkatan Pajak Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pajak Daerah.





2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta merupakan Unsur Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang, berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2021 mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan khusus yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan perencanaan, keuangan serta kepegawaian dan administrasi umum. Sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan





badan serta penatausahaan keuangan Badan.

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan manajemen kepegawaian, mengelola sarana dan prasarana kerja, mengelola administrasi dokumen Dinas, dan karsipan.

3. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang Pendataan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Pendataan dan Pelayanan. Bidang Pendataan dan Pelayanan ini terdiri atas:

a. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi

Subbidang Pelayanan dan Konsultasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendataan dan Pelayanan di Bidang Pelayanan dan Konsultasi.

b. Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB

Subbidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendataan dan Pelayanan di Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB.

c. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya

Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendataan dan Pelayanan di Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya.

4. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data

Bidang Penetapan dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Penetapan dan Pengolahan Data. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data ini terdiri atas:





a. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi

Subbidang Penetapan dan Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi bidang penetapan dan pengolahan data di bidang penetapan dan verifikasi.

b. Sub Bidang Pengolahan Data

Subbidang Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penetapan dan Pengolahan Data di bidang pengolahan data.

c. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan

Subbidang Analisa dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penetapan dan Pengolahan Data di bidang Analisa dan Pengembangan.

5. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan ini terdiri atas:

a. Sub Bidang Penagihan

Subbidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan di Bidang Penagihan.

b. Sub Bidang Pengendalian Keberatan

Subbidang Pengendalian Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan di bidang Pengendalian Keberatan.





c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

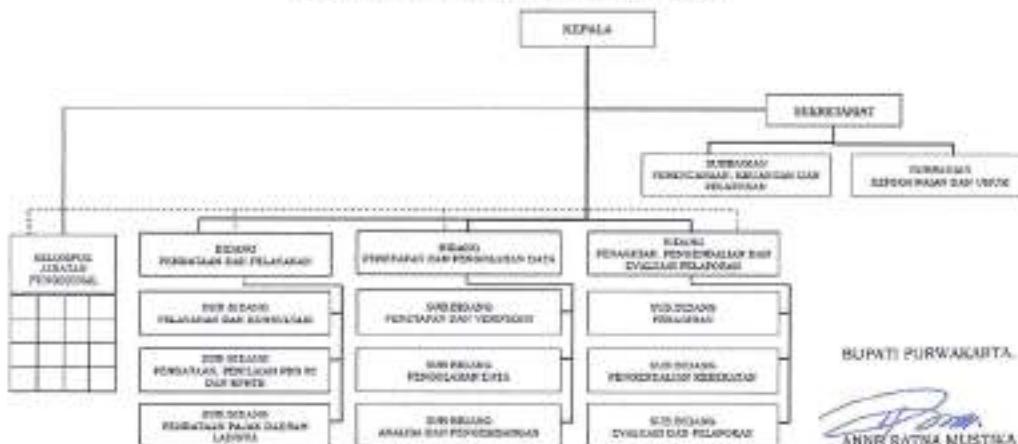
Subbidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 58 Tahun 2021:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
BAPENDA Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 58 TAHUN 2021
TAHUN : 04 JUNI 2021
TERTANGKAI : KETIKAKEV YANG DILAKUKAN PADA PENGETAHUAN SERTA TATA KEWAHAYAAN PENDAPATAN DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**



Sumber: SOTK Bapenda Kabupaten Purwakarta

Capaian Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan Uraian tentang capaian dan analisis kinerja yang menggambarkan mengenai capaian kinerja rutin maupun pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program selama Tahun 2020 yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp.5.127.740.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.542.996.523,- (88,60%). Capaian Kinerja Sangat Baik.
2. Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB dengan alokasi dana sebesar Rp.1.440.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.249.579.500,- (86,78%). Capaian Kinerja Sangat Baik.





3. Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB dengan alokasi dana sebesar Rp.1.339.800.000,- dengan realisasi keuangan Rp.1.047.899.150,- (78,21%). Capaian Kinerja Baik.
4. Program Intensifikasi Penagihan Pendapatan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.2.101.250.000,- dengan realisasi keuangan Rp.1.749.170.503,- (83,24%). Capaian Kinerja Sangat Baik.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPENDA

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, BAPENDA Kabupaten Purwakarta tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Bapenda yang tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai target yang ditetapkan. Kualitas SDM juga menjadi permasalahan tersendiri oleh karena tenaga teknis yang dimiliki masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi yang diharapkan dalam pengelolaan pajak daerah. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah;
- b. Adanya sistem *self-assessment* memungkinkan wajib pajak kurang transparan dalam melaporkan omzet usahanya sehingga rawan terjadi kebocoran pajak. Disamping itu, kadang masyarakat enggan untuk membayar pajak oleh karena mereka belum mengerti benar mengenai pentingnya fungsi pajak, terlebih mereka belum merasakan secara langsung hasil dari pajak yang mereka bayarkan;
- c. Administrasi perpajakan daerah masih lemah terutama yang menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur maupun komputerisasi; dan
- d. Akurasi basis data pajak daerah yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi pajak daerah yang sebenarnya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purwakarta dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini:





Tabel 2
Review Terhadap Rencangan Awal
RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
5.01	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah	4		3	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01	Kuangan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35,883,342,880	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah				35,883,342,880	
5.02.01					35,883,342,880	Keuangan Program				35,883,342,880	
					26,641,342,880	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				26,641,342,880	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB				
					100%	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran				Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					



Kode	Rancangan Awal RKPd				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Urusan' Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Urusan' Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	6	Purwakarta	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	8
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	2 Dokumen	25,000,000	Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	2 Dokumen
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	50,000,000	Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				50,000,000	Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	20,774,242,800	Purwakarta	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3	5	6	7	8	75,000,000
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	75,000,000
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan BMD SKPD yang disusun	4 Dokumen	25,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan BMD SKPD yang disusun	25,000,000
5 02 01 2.05	Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah					Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah			



Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkапannya	Purwakarta	Jumlah Pengadaan Pakaiian Dinas Harian Beserta Perlengkапannya	113 Stel 127 Stel	200,000,000	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Purwakarta	Jumlah Pengadaan Pakaiian Dinas Harian Beserta Perlengkapanya	113 Stel 127 Stel	200,000,000
5 02 01 2.05 03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	20 Orang	75,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	20 Orang	75,000,000
6 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purwakarta				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purwakarta			
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Item	25,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Item	25,000,000



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	8 item	400,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	8 item	400,000,000
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 item	25,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 item	25,000,000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	54 item 9 item 24 item	500,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	54 item 9 item 24 item	500,000,000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Purwakarta	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	46 Jenis 44.326 Lembar	500,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Purwakarta	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	46 Jenis 44.326 Lembar	500,000,000



Kode	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Purwakarta	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Yang Disediakan	84 Buku	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Purwakarta	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Yang Disediakan	64 Buku	10,000,000
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Jumlah Fasilitas Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu Yang Disediakan	6 Item	60,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Jumlah Fasilitas Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu Yang Disediakan	6 Item	60,000,000
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	407 HK	175,000,000	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	407 HK	175,000,000
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	150,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	150,000,000





Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Pemeliharaan Instalasi Server dan Jaringan LAN Jumlah Peralatan Penitukung Jaringan SPBE Yang Disediakan	1 Paket 10 Item	200,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Pemeliharaan Instalasi Server dan Jaringan LAN Jumlah Peralatan Pendukung Jaringan SPBE Yang Disediakan	1 Paket 10 Item	200,000,000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	650,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Yang disediakan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang disediakan	5 Unit	650,000,000
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang disediakan	6 Jenis	200,000,000	Jumlah Mebel Yang Disediakan	Purwakarta	Jumlah Mebel Yang Disediakan	6 Jenis	200,000,000
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Purwakarta	Jumlah Mebel Yang Disediakan	1 Unit	185,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	185,000,000



Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan' Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
6 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	-4	3	5	6	7	8	9	10
6 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	Jumlah Materai Yang Disediakan	500 Lembar	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	Jumlah Materai Yang Disediakan	500 Lembar	5.000.000
6 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	Jumlah Penyediaan Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	625.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	Jumlah Penyediaan Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	625.000.000
6 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	Jumlah Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi yang disediakan	5 Orang 27 Orang 62 Orang	1.102.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	Jumlah Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi yang disediakan	5 Orang 27 Orang 62 Orang	1.102.100.000



Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	4	3	5	6	7	8
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas.Jabatan	Penyediaan	Purwakarta	Pemeliharaan Ruini/Berkala Mobil Jabatan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas.Jabatan	Purwakarta Pemeliharaan Ruini/Berkala Mobil Jabatan	12 Bulan
					30.000.000			30.000.000



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
5 02 01 209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Pembayaran Pajak, Bea dan Penizinan Kendaraan Jumlah Pemeliharaan Ruini/Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31 Unit 13 Unit	5	6	7	8	9	10
5 02 01 209 05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	Jumlah Pemeliharaan Ruini/Berkala Peralatan dan Mesin Gedung Kantor	151 Unit	150,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	Jumlah Pemeliharaan Ruini/Berkala Peralatan dan Mesin Gedung Kantor	151 Unit	150,000,000
5 02 01 209 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purwakarta	Pemeliharaan Ruini/Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1 Unit 1 Unit	300,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purwakarta	Pemeliharaan Ruini/Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1 Unit 1 Unit	300,000,000





Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pajak Indikatif (Rp)	Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pajak Indikatif (Rp)
5 02 04 1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2	4	3	5	6	7	8	9	10
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				9,242,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				9,242,000,000
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					6.50				6.50
5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Purwakarta	Jumlah Perencanaan pengelolaan pajak daerah	2 dokumen	200,000,000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Purwakarta	Jumlah Perencanaan pengelolaan pajak daerah	2 dokumen	200,000,000
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Peraturan Pajak Daerah	Purwakarta	Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah, Penyusunan Peraturan Pajak Daerah	12 Bulan ¹ Peraturan	322,000,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Peraturan Pajak Daerah	Purwakarta	Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah, Penyusunan Peraturan Pajak Daerah	12 Bulan ¹ Peraturan	322,000,000





Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Purwakarta	Pembinaan dan Sosialisasi BPHTB Pembinaan dan Sosialisasi PBB Pembinaan Kepada Wajib Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	130 PPAT/PPATS 17 Kecamatan 250 Wajib Pajak 240	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Purwakarta	Pembinaan dan Sosialisasi BPHTB Pembinaan dan Sosialisasi PBB Kepada Wajib Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	130 PPAT/PPATS 17 Kecamatan 250 Wajib Pajak 240
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Purwakarta	Peningkatan Sarana Pelayanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	12 Bulan	400,000.000 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Purwakarta	Peningkatan Sarana Pelayanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	12 Bulan
5.02.04.2.02.05	Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Pendataan dan Pendataan Objek Pajak Daerah	10 objek pajak	200,000.000 Pendataan dan Objek Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Pendataan dan Pendataan Objek Pajak Daerah	10 objek pajak
								200,000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
6.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Purwakarta	Evaluasi dan Pelaporan Pendukungan Atas Monitoring Tapping Box Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Dashboard Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Peta Digital Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi E-SPTPO Pemeliharaan pengembangan Aplikasi SIMPATTA Pemeliharaan ZHT PBB P2 Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah Non jsd dan BPHTB Pemeriksaan Nasai SPTT dan DHKP PBB P2 Pengadaan Aplikasi Payment PAD Virtual Account	4 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pendukungan Atas Monitoring Tapping Box Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Dashboard Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Peta Digital Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi E-SPTPO Pemeliharaan pengembangan Aplikasi SIMPATTA Pemeliharaan ZHT PBB P2 Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah Non jsd dan BPHTB Pemeriksaan Nasai SPTT dan DHKP PBB P2 Pengadaan Aplikasi Payment PAD Virtual Account	3.200.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Purwakarta	Evaluasi dan Pelaporan Pendukungan Atas Monitoring Tapping Box Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Dashboard Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Peta Digital Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi E-SPTPO Pemeliharaan pengembangan Aplikasi SIMPATTA Pemeliharaan ZHT PBB P2 Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah Non jsd dan BPHTB Pemeriksaan Nasai SPTT dan DHKP PBB P2 Pengadaan Aplikasi Payment PAD Virtual Account	4 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pendukungan Atas Monitoring Tapping Box Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Dashboard Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Peta Digital Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi E-SPTPO Pemeliharaan pengembangan Aplikasi SIMPATTA Pemeliharaan ZHT PBB P2 Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah Non jsd dan BPHTB Pemeriksaan Nasai SPTT dan DHKP PBB P2 Pengadaan Aplikasi Payment PAD Virtual Account	3.200.000.000





Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBSP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Purwakarta	Pendataan dan Penetapan Objek dan Subjek Pajak PBSP2 serta BPHTB Terikatannya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBSP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	90 Permasalahan	375,000,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBSP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Purwakarta	Pendataan dan Subjek Pajak PBSP2 serta BPHTB Terikatannya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBSP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	90 Permasalahan	375,000,000
5 02 04 2.02 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah SPPD, SPPT dan DHKP	10 objek pajak	200,000,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah SPPD, SPPT dan DHKP	10 objek pajak	200,000,000



Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Purwakarta	Apreasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB	12 Bulan 3	12 Bulan 5	975,000,000 6	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Purwakarta	Apreasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB	12 Bulan 8	975,000,000 11
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Purwakarta	Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi MBLB Pemeliharaan Tapping Box Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	1 Aplikasi 10 Unit 8 Dokumen	275,000,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Purwakarta	Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi MBLB Pemeliharaan Tapping Box Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	1 Aplikasi 10 Unit 8 Dokumen	275,000,000	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dan/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan/ Pagu Indikatif (Rp)		
1	2.04.2.01.11	Pengelihan Pajak Daerah	Purwakarta	Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Peningkatan Penetapan Pajak Daerah Pengendalian dan Pengawasan Penyetaraan SKPD	12 Bulan	5	6	7	8	9	10	11
5.02.04.2.01.11	Pengelihan Pajak Daerah	Purwakarta	Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Peningkatan Penetapan Pajak Daerah Pengendalian dan Pengawasan Penyetaraan SKPD	12 Bulan	1,350,000,000	Pengelihan Pajak Daerah	Purwakarta	Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Peningkatan Penetapan Pajak Daerah Pengendalian dan Pengawasan Penyetaraan SKPD	12 Bulan	1,350,000,000		
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Purwakarta	Pengendalian dan Pengawasan Penyelesaian, Pembatalan dan Keberatan Pajak Daerah	500 Dokumen	375,000,000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Purwakarta	Pengendalian dan Pengawasan Penyelesaian, Pembatalan dan Keberatan Pajak Daerah	500 Dokumen	375,000,000		
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemerkasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Purwakarta	Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Peningkatan Potensi Wajib Pajak Daerah (Uji Petik)	12 Bulan	250,000,000	Pengendalian, Pemerkasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Purwakarta	Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Peningkatan Potensi Wajib Pajak Daerah (Uji Petik)	12 Bulan	250,000,000		
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Purwakarta	Pengendalian Penetapan Pendapatan Retribusi Daerah	12 Bulan	320,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Purwakarta	Pengendalian Penetapan Pendapatan Retribusi Daerah	12 Bulan	320,000,000		





2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pelaksana Urusan pemerintahan bidang fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, peda dasarnya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi.





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam RPJMN 2020-2024 dimana terdapat **7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional** diantaranya yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemanitan, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemanitan, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah





yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui penuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pernajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.





5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.





Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Adapun Isu Strategis Nasional Tahun 2022 adalah:

1. Kemiskinan;
2. Lapangan Kerja;
3. UMKM; dan
4. Industri.

Sedangkan Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Industri;
2. Pariwisata;
3. Ketahanan Pangan;
4. UMKM;
5. Infrastruktur;
6. Transformasi Digital;
7. Pembangunan Rendah Karbon;
8. Reformasi Perlindungan Sosial;
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan; dan
10. Reformasi Kesehatan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPENDA

Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Adapun Visi dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah "**MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA.**"

Sebagai bentuk perwujudan Visi, maka disusunlah Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan; dan
4. Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut maka Bapenda mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Capalannya sesuai dengan Renstra Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, seperti dalam Tabel 3.1:





Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bapenda Tahun 2019-2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TUJUAN										
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
SASARAN										
Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persen	18.41	17.90	19.00	19.25	19.50	19.75	20.00	

Sumber Dari: Penubahan Renstra Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BAPENDA

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Bapenda Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2022 terdiri atas:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini memiliki Indikator: Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- ↳ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ↳ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ↳ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD





- ▲ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ▲ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - j) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- ▲ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Mebel
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ▲ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ▲ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini memiliki Indikator: Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); Persentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- ▲ Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - a) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - b) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah





- c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- d) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- e) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- f) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- g) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- h) Penagihan Pajak Daerah
- i) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- j) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- k) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 di Bapenda Kabupaten Purwakarta:





**TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PURWAKARTA**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan			36,883,342,880				37,910,041,713	
5	02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			36,883,342,880				37,910,041,713	
					26,641,342,880				27,605,041,713	
								BB		
									100%	
										100%
6	02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5	02 01 2.01 01	Penyusunan Rensra dan Rensa Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rensra dan Rensa	Purwakarta	2 Dokumen	25,000,000	PAD		2 Dokumen	25,000,000
5	02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Purwakarta	2 Dokumen	25,000,000	PAD		2 Dokumen	25,000,000
5	02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja	Purwakarta	4 Dokumen	50,000,000	PAD		4 Dokumen	50,000,000





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyeadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	14 Bulan	20.774.242.880	PAD	14 Bulan		21.817.941.713
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Purwakarta	4 Dokumen	75.000.000	PAD	4 Dokumen		75.000.000
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan							
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD SKPD yang disusun	Purwakarta	4 Dokumen	25.000.000	PAD	4 Dokumen		25.000.000
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD SKPD yang disusun							
5 02 01 2.05	Administrasi Kepergawahan Perangkat Daerah	Jumlah Pengaduan Pakaian Dinas Harian Beserta Kelengkapannya	Purwakarta	113 Stel 127 Stel	200.000.000	PAD	113 Stel 127 Stel		200.000.000
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alinbut Kelengkapannya	Jumlah Pengaduan Pakaian Dinas Harian Beserta Kelengkapananya							
5 02 01 2.05 05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Purwakarta	20 Orang	75.000.000	PAD	20 Orang		75.000.000
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Cataatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	20 Item	25,000,000	PAD		20 Item	25,000,000
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	Purwakarta	8 Item	400,000,000	PAD		8 Item	400,000,000
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Purwakarta	20 Item	25,000,000	PAD		20 Item	25,000,000
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Komponen Printer Yang Disediakan	Purwakarta	54 Item 9 Item 24 Item	500,000,000	PAD		54 Item 9 Item 24 Item	500,000,000
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	Purwakarta	46 Jenis 44326 Lembar	500,000,000	PAD		46 Jenis 44326 Lembar	500,000,000
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Purwakarta	64 Buku	10,000,000	PAD		64 Buku	10,000,000
5 02 01 2.06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu Yang	Purwakarta	6 Item	60,000,000	PAD		6 Item	60,000,000





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				1	2	3				
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Purwakarta	407 HK	175,000,000	PAD	7	8	407 HK	175,000,000
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Purwakarta	10 Dokumen	150,000,000	PAD	9	10	10 Dokumen	150,000,000
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pemeliharaan Instalasi Server dan Jaringan LAN Jumlah Peralatan Pendukung Jaringan SPBE Yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket 10 Item	200,000,000	PAD	11	12	1 Paket 10 Item	200,000,000
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	5 Unit	650,000,000	PAD	13	14	5 Unit	650,000,000
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang disediakan	Purwakarta	6 Jenis	200,000,000	PAD	15	16	6 Jenis	200,000,000
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mbel	Jumlah Mebel Yang Disediakan	Purwakarta	1 Unit	185,000,000	PAD	17	18	1 Unit	185,000,000
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	1 Unit	5,000,000	PAD	19	20	1 Unit	5,000,000
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Yang Disediakan	Purwakarta	500 Lembar	5,000,000	PAD	21	22	500 Lembar	5,000,000
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan	Purwakarta	500 Lembar	5,000,000	PAD	23	24	500 Lembar	5,000,000





Kode	Unusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	12 Bulan	625,000,000	PAD		12 Bulan	625,000,000
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi yang disediakan Jumlah Jasa Tenaga PTT dan THL yang disediakan Jumlah Tersedaya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pris	Purwakarta	5 Orang 27 Orang 62 Orang	1,102,100,000	PAD		5 Orang 27 Orang 62 Orang	1,102,100,000
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Purwakarta	12 Bulan	30,000,000	PAD		12 Bulan	30,000,000
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak, Biaya dan Perizinan Kendaraan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Purwakarta	31 Unit 13 Unit	100,000,000	PAD		31 Unit 13 Unit	100,000,000
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Ruin/Berkala Peralatan dan Mesin Gedung Kantor	Purwakarta	151 Unit	160,000,000	PAD		151 Unit	150,000,000
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Ruin/Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor	Purwakarta	1 Unit 1 Unit	300,000,000	PAD		1 Unit 1 Unit	300,000,000
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				9,242,000,000				10,225,000,000
				70.00				70.00	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Percentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.50				6.50	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Purwakarta	2 dokumen	200,000,000	PAD		2 dokumen	250,000,000
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah Penyusunan Peraturan Pajak Daerah	Purwakarta	12 Bulan 1 Peraturan	322,000,000	PAD		12 Bulan 1 Peraturan	375,000,000





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Misi/Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 04 2.01 03	Penyaluran dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pembinaan dan Sosialisasi BPHTB Pembinaan dan Sosialisasi PBB Pembinaan Kepada Wajib Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	Purwakarta	130 PPAT/PPATS 17 Kecamatan 250 Wajib Pajak 240 Wajib Pajak	800.000.000	PAD	130 PPAT/PPATS 17 Kecamatan 250 Wajib Pajak 240 Wajib Pajak	825.000.000	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Peningkatan Sarana Pelayanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	Purwakarta	12 Bulan	400.000.000	PAD	12 Bulan	450.000.000	
5 02 04 2.02 05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Purwakarta	10 objek pajak	200.000.000	PAD	10 objek pajak	250.000.000	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penitng	Target Capaian Kinerja	Praktik Maju Rencana Tahun 2023
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	Sumber Dana			
5 02 04 2.01 05	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10
	Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah Pemeliharaan Aset Monitoring Tapping Box Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Dashboard Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pela Digital Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi E-SPTPD Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi SIMPATDA Pemeliharaan ZINT PBB F2 Pemeliharaan Data Verifikasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Pencairan dan Masa SPT dan DHCP PBB P2 Penagihan Aplikasi Payment PAD Virtual Account Pengembangan Aplikasi Program Interface (API) non PBB dan BPHTB Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Retribusi Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan BPHTB Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan E-PBB Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan PBB Penataan Data Objek dan Subjek Pajak PBB P2 Rekomunikasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Purwakarta	4 Kegiatan 45 Unit 1 Aplikasi	3.200.000.000	PAD	4 Kegiatan 45 Unit 1 Aplikasi	3.275.000.000		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pendaaran dan Penelitian Objek dan Subjek Pajak PBB P2 serta BPHTB Terleksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah SPPD, SPPT dan DHKP	Purwakarta	90 Permasalahan	375.000.000	PAD	γ	0	90 Permasalahan
5 02 04 2.02 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Apreiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Pengelolaan Pelayanan PBS dan Validasi BPHTB Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Non PBS dan BPHTB	Purwakarta	10 objek pajak	200.000.000	PAD	10 objek pajak	250.000.000	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Purwakarta	12 Bulan	975.000.000	PAD	12 Bulan	1.100.000.000	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi MBLB Pemeliharaan Tapping Box Penelitian dan Pemerisaan Lapangan	Purwakarta	1 Aplikasi 10 Unit 8 Dokumen	275.000.000	PAD	1 Aplikasi 10 Unit 8 Dokumen	325.000.000	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pengendalian dan Pengawasan Penyebaran SKPD	Purwakarta	12 Bulan	1.350.000.000	PAD	12 Bulan	1.600.000.000
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengendalian dan Pengawasan Pengurangan, Pembatalan dan Keberatan Pajak Daerah	Purwakarta	500 Dokumen	375.000.000	PAD	500 Dokumen	425.000.000
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Peningkatan Potensi Wajib Pajak Daerah (Uji Pedik)	Purwakarta	12 Bulan	250.000.000	PAD	12 Bulan	300.000.000
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengendalian Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah	Purwakarta	12 Bulan	320.000.000	PAD	12 Bulan	375.000.000





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:





RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPENDA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikator
5 01	2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan	3	4	5	6	7	8	10
5 02 01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35,083,342,880				37,910,041,713
5 02 01 2.01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35,083,342,880				37,910,041,713
5 02 01 2.01 01	01	Penyusunan Rensstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Ranja	Purwakarta	2 Dokumen	25,000,000	FAD	2 Dokumen	25,000,000
5 02 01 2.01 05	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Purwakarta	2 Dokumen	25,000,000	FAD	2 Dokumen	25,000,000
5 02 01 2.01 07	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja	Purwakarta	4 Dokumen	50,000,000	FAD	4 Dokumen	50,000,000





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
5 02 01 2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	4	5	6	7	8	10
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	14 Bulan	20,774,242,880	PAD	14 Bulan	21,617,941,713
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Purwakarta	4 Dokumen	75,000,000	PAD	4 Dokumen	75,000,000
5 02 01 2.03	2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD SKPD yang disusun	Purwakarta	4 Dokumen	25,000,000	PAD	4 Dokumen	25,000,000
5 02 01 2.05	2 Administrasi Kepergawahan Perangkat Daerah							
5 02 01 2.05 02	2 Pengadaan Paketan Dinas Berasite Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Paketan Dinas Hariin Berasita Per lengkapannya	Purwakarta	113 Stel 127 Stel	200,000,000	PAD	113 Stel 127 Stel	200,000,000
5 02 01 2.05 09	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Purwakarta	20 Orang	75,000,000	PAD	20 Orang	75,000,000
5 02 01 2.06	2 Administrasi Umum Perangkat Daerah							





Kode	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Cataatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	20 Item	25,000,000	PAD		20 Item	25,000,000
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	Purwakarta	8 Item	400,000,000	PAD		8 Item	400,000,000
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Purwakarta	20 Item	25,000,000	PAD		20 Item	25,000,000
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Komponen Printer Yang Disediakan	Purwakarta	54 Item 9 Item 24 Item	500,000,000	PAD		54 Item 9 Item 24 Item	500,000,000
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengondaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan Jumlah Pengondaan yang disediakan	Purwakarta	46 Jenis 44326 Lembar	500,000,000	PAD		46 Jenis 44326 Lembar	500,000,000
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Purwakarta	84 Buku	10,000,000	PAD		84 Buku	10,000,000
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu Yang	Purwakarta	6 Item	50,000,000	PAD		6 Item	50,000,000





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana				
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Purwakarta	407 HKK	175.000.000	PAD	7	8	407 HKK	175.000.000
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Purwakarta	10 Dokumen	150.000.000	PAD	10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000	150.000.000
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pemeliharaan Instalasi Server dan Jaringan LAN, Jumlah Peralatan Pendukung Jaringan SPBE Yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket 10 Item	200.000.000	PAD	1 Paket 10 Item	1 Paket 10 Item	200.000.000	200.000.000
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang disediakan	Purwakarta	5 Unit	650.000.000	PAD	5 Unit	5 Unit	650.000.000	650.000.000
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mebeléur Yang Disediakan	Purwakarta	6 Jenis	200.000.000	PAD	6 Jenis	6 Jenis	200.000.000	200.000.000
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	1 Unit	185.000.000	PAD	1 Unit	1 Unit	185.000.000	185.000.000
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Yang Disediakan	Purwakarta	500 Lembar	5.000.000	PAD	500 Lembar	500 Lembar	5.000.000	5.000.000
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Praktisan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	12 Bulan	625.000.000	PAD	7	8	12 Bulan
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi yang disediakan Jumlah Jasa Tenaga PTT dan THL yang disediakan Jumlah Tersediaryna Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Purwakarta	6 Orang 27 Orang 62 Orang	1.102.100.000	PAD	5 Orang 27 Orang 62 Orang	5 Orang 27 Orang 62 Orang	1.102.100.000
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan RuangBerkala Mobil Jabatan	Purwakarta	12 Bulan	30.000.000	PAD	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000
5 02 01 2.09 01	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penbayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Jumlah Pemeliharaan RuangBerkala Kendaraan DinasOperasional	Purwakarta	31 Unit 13 Unit	100.000.000	PAD	31 Unit 13 Unit	31 Unit 13 Unit	100.000.000
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Cataatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	Sumber Dana			
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Gedung Kantor	Purwakarta	151 Unit	150.000.000	PAD	7	8	151 Unit
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor	Purwakarta	1 Unit 1 Unit	300.000.000	PAD		1 Unit 1 Unit	300.000.000
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				9.242.000.000				10.225.000.000
		Percentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.00					70.00
		Percentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.50					6.50
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Purwakarta	2 dokumen	200.000.000	PAD		2 dokumen	250.000.000
5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah Penyusutan Peraturan Pajak Daerah	Purwakarta	12 Bulan 1 Peraturan	322.000.000	PAD		12 Bulan 1 Peraturan	375.000.000





Kode	Unusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 04 2.01 03	Penyaluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pembinaan dan Sosialisasi BPHTB Pembinaan dan Sosialisasi PBB Pembinaan Kepada Wajib Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	Purwakarta	130 PPAT/PPATS 17 Kecamatan 250 Wajib Pajak 240 Wajib Pajak	800,000,000	PPAD	0	130 PPAT/PPATS 17 Kecamatan 250 Wajib Pajak 240 Wajib Pajak	825,000,000
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Peningkatan Sarana Pelayanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	Purwakarta	12 Bulan	400,000,000	PPAD	12 Bulan	450,000,000	
5 02 04 2.02 05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Purwakarta	10 objek pajak	200,000,000	PPAD	10 objek pajak	250,000,000	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Praktikaan Maju Rencana Tahun 2023	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	Sumber Dana				
5 02 04 2.01 06	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Daerah Pemeliharaan Alat Monitoring Tapping Box Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Peta Digital Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi E-SPTPO Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi SIMPATDA Pemeliharaan ZHT PBB P2 Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Pengelolaan Masa/ SPPT dan DHKP PBB P2 Pengadaan Aplikasi Payment PAD Virtual Account Pengembangan Aplikasi Program Interface (API) non PBB dan BPHTB Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi ReitBali Peningkatan Sistem Informasi Pengelolahan BPHTB Pengelolaan Efekom Informasi Pengelolahan E-Ptb Peningkatan Sistem Informasi Pengelolahan Perekaman Data Objek dan Subjek Pajak PBB P2 Rekonstruksi Penetapan Pendapatan Daerah	Purwakarta	4 Kegiatan 45 Unit 1 Apikasi 1 Apikasi 1 Apikasi 1 Apikasi 1 Kecamatan 8 Jenis Pajak Daerah 447772 SPPT	4 Kegiatan 45 Unit 1 Apikasi 1 Apikasi 1 Apikasi 1 Apikasi 1 Kecamatan 8 Jenis Pajak Daerah 447772 SPPT	3,200,000,000 PAD	7	9	4 Kegiatan 45 Unit 1 Apikasi 1 Apikasi 1 Apikasi 1 Apikasi 1 Kecamatan 8 Jenis Pajak Daerah 447772 SPPT	3,275,000,000





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	6			
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak PBB P2 serta BPHTB Terlaksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Junjish SPPD, SPPT dan DHKP	Purwakarta	90 Permasalahan	375.000.000	PAD	7	8	90 Permasalahan	425.000.000
5 02 04 2.02 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Apreksiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	Purwakarta	10 objek pajak	200.000.000	PAD	10 objek pajak	250.000.000		
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Purwakarta	12 Bulan	975.000.000	PAD	12 Bulan	1.100.000.000		
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi MBLB Pemeliharaan Tapping Box Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan	Purwakarta	1 Aplikasi 10 Unit 8 Dokumen	275.000.000	PAD	1 Aplikasi 10 Unit 8 Dokumen	325.000.000		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana				
5 02 04 2.01 11	Peningkatan Pajak Daerah	Pengarmanan, Pengendalian dan Pengawasan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pengendalian dan Pengawasan Penyebaran SKPD	Purwakarta	12 Bulan	1.350.000.000	PAD	7	8	12 Bulan	1.600.000.000
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengendalian dan Pengawasan Pengurangan, Pembatalan dan Keberatan Pajak Daerah	Purwakarta	500 Dokumen	375.000.000	PAD	500 Dokumen	500 Dokumen	12 Bulan	425.000.000
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Peningkatan Potensi Wajib Pajak Daerah (Uji Petik)	Purwakarta	12 Bulan	250.000.000	PAD	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengendalian Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah	Purwakarta	12 Bulan	320.000.000	PAD	12 Bulan	375.000.000	12 Bulan	375.000.000





BAB V PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memuat Tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi, Program dan Usulan Kegiatan Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Renja Bapenda Kabupaten Purwakarta selain menjadi Acuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bapenda. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bapenda Kabupaten Purwakarta. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta seluruh staff Bapenda Kabupaten Purwakarta sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Semoga Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

Purwakarta, Juli 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

